

Menteri Keuangan Suahasil Tegaskan Komitmen Disiplin Fiskal dan Efisiensi APBN



Sumber : Sekretariat Negara |

Pelantikan menteri keuangan baru menandai kesinambungan pengelolaan APBN dengan target defisit di bawah 3% dan menjadikannya sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru dilantik, Suahasil Nazara, mengonfirmasi komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seusai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Suahasil menegaskan fokus utama pada penguatan kesehatan keuangan negara demi menopang pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional.

Di tengah ketidakpastian pasar dan tantangan penerimaan negara, kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan mengirimkan sinyal stabilitas yang kuat kepada investor global. Suahasil secara tegas menyatakan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, serta menjamin batas aman defisit anggaran akan tetap dipertahankan di bawah koridor 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengelolaan belanja negara ke depan tidak lagi semata-mata diukur dari pemotongan alokasi anggaran, melainkan pada maksimalisasi hasil yang berdampak langsung bagi masya-

rakat dan memastikan setiap rupiah belanja publik menghasilkan multiplier effect nyata bagi perekonomian nasional.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” tegas Suahasil Senin (14/09).

Guna menjaga kepercayaan pasar dan konsistensi arus modal, instrumen komunikasi publik yang transparan akan menjadi salah satu pilar utama tata kelola fiskal.

Suahasil Nazara bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia merupakan ekonom yang telah lama berkarier di bidang kebijakan fiskal, dan bergabung di jajaran Kementerian Keuangan sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2019 menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga proses transisi internal dapat dipastikan berjalan mulus untuk menjamin kesinambungan program prioritas pemerintah serta stabilitas makroekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Desak Konsolidasi BRICS guna Reformasi Tata Kelola Keuangan Global



Sumber : BRICS 2026 India |

Presiden Prabowo serukan penguatan kapasitas mandiri Global South serta mendorong larangan penggunaan instrumen mata uang dan perdagangan internasional sebagai senjata politik dalam sengketa antarnegara.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan penguatan kekuatan kolektif blok BRICS untuk mereformasi struktur tata kelola global dan lembaga keuangan internasional. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pembiayaan pembangunan bagi negara-negara berkembang (*Global South*).

Menyoroti cakupan BRICS yang mewakili separuh populasi dunia serta porsi signifikan dalam perekonomian global, Prabowo menilai blok ini memiliki leverage politik-ekonomi yang memadai. Menurutnya, pemobilisasian modal, sumber daya, dan teknologi antar-anggota sangat krusial guna menjamin ketahanan pangan serta pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik.

“BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat

besar,” ujar Presiden Prabowo di New Delhi Sabtu (12/09).

Selain itu Prabowo secara eksplisit mengingatkan mengenai pentingnya membangun sistem multilateral yang menjadi lebih inklusif dan responsif, namun disisi lain PBB harus tetap berada di pusat sistem multilateral ini dengan catatan harus ada reformasi agar lebih representatif. Selain itu, Prabowo menegaskan mekanisme perdagangan internasional dan instrumen mata uang tidak boleh dijadikan senjata politik dalam sengketa antarnegara.

“PBB harus lebih representatif dan responsif. Pada saat yang sama, lembaga keuangan internasional harus berkembang; perdagangan dan mata uang tidak boleh dipersenjatai,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan Indonesia untuk menciptakan tatanan multipolar yang adil. Dengan menghubungkan pasar dan kapasitas teknologi BRICS, *Global South* diharapkan dapat menentukan serta membiayai masa depan ekonominya secara mandiri tanpa tekanan eksternal.

Kementerian UMKM Jadikan Model Waralaba Instrumen Skalabilitas Bisnis untuk Ekspansi Pasar



Sumber : Kementerian UMKM

Pemerintah mendorong UMKM menggunakan model bisnis waralaba untuk mengakselerasi skala usaha, dan mentransformasi merek lokal yang didukung dari segi pembiayaan untuk memperluas jangkauan pasar guna memicu ekspansi ke pasar global.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan model bisnis waralaba sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi peningkatan skala usaha nasional. Kebijakan ini dirancang guna mentransformasi merek lokal agar memiliki sistem operasional terstruktur, standar mutu yang konsisten, serta daya jangkauan ekspansi pasar yang lebih luas.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menegaskan dalam Pameran *Info Franchise and Business Concept* (IFBC) 2026 di Surabaya bahwa waralaba bertindak sebagai kendaraan universal lintas sektor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per April 2026, baru terdapat 169 pemberi waralaba lokal bersertifikat STPW, mengindikasikan ruang pertumbuhan ekspansi domestik yang masih sangat terbuka luas.

Melalui model waralaba, pengusaha UMKM yang telah memiliki merek, standar produk atau layanan, serta model bisnis yang kuat memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus mengembangkan seluruh jaringan usahanya secara mandiri.

Guna memperkuat daya saing, pemerintah mengintegrasikan pendampingan digital melalui aplikasi SAPA UMKM dan skema Holding UMKM Berbasis Klaster. Melalui pendekatan ini, usaha menengah difungsikan sebagai jangkar rantai pasok yang memfasilitasi integrasi mutu, legalitas, serta sertifikasi secara terintegrasi.

“Franchise atau waralaba merupakan salah satu platform bisnis yang sangat diperlukan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Model waralaba harus menjadi bagian dari strategi bisnis. Kami ingin memastikan waralaba Indonesia tidak hanya berjaya di dalam negeri, tetapi mampu mengeksport sistem bisnisnya ke pasar internasional,” ujar Bagus Jumat (11/09).

Penguatan ekosistem ini didukung realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp197 triliun bagi 3,1 juta debitur hingga Agustus 2026. Dengan porsi mayoritas pada sektor produktif, pembiayaan ini diharapkan mengokohkan fondasi UMKM untuk bertransformasi menjadi *master franchisor* global.

Kabupaten Bekasi Bidik Investasi Rp70 Triliun Berebakal Status Hub Manufaktur



Sumber : Pemkab Bekasi |

Untuk mengakselerasi pertumbuhan kawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengandalkan stabilitas hubungan industrial dan kondusivitas wilayah guna mengamankan arus modal ke pusat industri manufaktur terbesar Asia Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan target investasi ambisius sebesar Rp70 triliun pada tahun 2026 guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Kebijakan ini menempatkan kawasan yang diklaim sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara tersebut sebagai tumpuan utama penyerapan modal industri di Indonesia.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan sasaran tersebut saat menghadiri konsolidasi organisasi buruh FS-PMI. Setelah berhasil mengamankan arus modal sebesar Rp50 triliun, pemerintah daerah optimis lonjakan arus investasi baru dapat terealisasi berkat dukungan ekosistem industri yang mencakup 9.100 korporasi besar hingga 58.000 entitas usaha berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB). Kabupaten Bekasi juga memiliki sejumlah kawasan industri yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah sekaligus modal untuk menarik investasi baru.

Guna mempertahankan daya tarik investasi, Pemkab Bekasi memprioritaskan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui hubungan

industrial yang berkeadilan dan melalui dialog dan perundingan konstruktif dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Langkah ini menempatkan serikat pekerja sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi ketimbang sekadar faktor produksi dalam ekosistem manufaktur lokal, dan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak buruh, dan kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha.

“Keberlanjutan investasi sangat bergantung pada kondusivitas daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi siap memfasilitasi dialog konstruktif antara buruh dan pengusaha sesuai batas kemampuan perusahaan. Hubungan industrial yang berkeadilan dan kondusivitas investasi sangat relevan dan menjadi komitmen bersama yang harus kita wujudkan.” tegas Asep Jumat (11/09).

Dengan menjaga stabilitas iklim usaha di kawasan koridor industri utama ini, Kabupaten Bekasi berupaya memperkuat perannya sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi nasional serta pusat pertumbuhan modal manufaktur global.

Pemprov Sulawesi Selatan Terapkan Pembatasan Ganjil-Genap dan Desak Tambahan Kuota BBM



Sumber : Pemprov Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melobi direksi Pertamina serta menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi eskalasi konsumsi dan juga menindak penyalahgunaan distribusi BBM subsidi untuk mengamankan kelancaran pasokan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan skema intervensi pasar dan penjatahan darurat guna mengurai krisis antrean BBM bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah yang berlaku pada 13–20 September ini memadukan pembatasan kendaraan ganjil-genap untuk jenis Pertalite dan Solar dengan tindakan penegakan hukum terhadap sirkulasi pasokan gelap.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, guna mendesak penambahan kuota energi daerah. Melalui Dinas ESDM, Pemprov Sulsel menyurati Pertamina Patra Niaga untuk menambah infrastruktur darurat seperti Modular SPBU di kawasan komersial guna menambah layanan sekaligus membagi kepadatan distribusi.

Mulai Senin 14 September, sebanyak tiga unit Modular SPBU melayani kendaraan roda dua atau sepeda motor. Kehadiran layanan ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan proses pelayanan

yang lebih tertib. Dalam penerapannya, pengisian BBM di Modular SPBU kawasan CPI menggunakan sistem pelat nomor ganjil dan genap. Untuk pengisian Pertalite ditetapkan maksimal 3 liter.

Guna mengurangi eskalasi konsumsi, Pemprov Sulawesi Selatan mengombinasikan pembatasan armada truk, opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlaku mulai tanggal 14 sampai 18 September, serta pengetatan pengawasan lapangan bersama aparat kepolisian guna menindak tegas perembesan BBM subsidi ke sektor industri non-peruntukan.

“Kami mengevaluasi pasokan dan meminta Pertamina segera menambah kuota. Bersama aparat, kami juga menyisir distributor ilegal yang mengalihkan BBM subsidi,” tegas Andi Sudirman Minggu (13/09).

Pemantauan bersama BPH Migas di SPBU Makassar menunjukkan penyusutan antrean hingga ke dalam area pengisian. Kombinasi diplomasi alokasi BBM dan pembatasan mobilitas ini diharapkan mampu menstabilkan rantai pasok energi domestik secara berkelanjutan.

Gelombang Suksesi Gen-F2 Mengubah Peta Kepemimpinan Korporasi Vietnam



Sumber : Vingroup |

Para taipan konglomerat Vietnam mempercepat transisi kekuasaan kepada generasi muda di tengah tuntutan modernisasi dan tata Kelola, serta dihadapkan pada ujian untuk membuktikan keahlian mensiasati perlambatan ekonomi domestik.

Dunia korporasi Vietnam tengah mengalami pergeseran kepemimpinan paling masif dalam dekade ini. Gelombang suksesi ke generasi kedua (F2) melanda jajaran konglomerat utama—mulai dari sektor otomotif, properti, hingga perbankan—setelah para pendiri menyerahkan kendali operasional kepada anak-anak mereka yang berpendidikan Barat.

Langkah paling menonjol datang dari Vingroup. Pham Nhat Quan Anh, putra miliarder Pham Nhat Vuong, resmi ditunjuk memegang kendali penuh sebagai Presiden Direktur dan CEO VinFast Global serta VinFast Vietnam. Keputusan ini mempertegas akselerasi kepemimpinan generasi muda dalam mendorong strategi ekspansi global kendaraan listrik.

Pham Nhat Quan Anh, lulus dari Singapore Management University. Sebelum menjadi Presiden Direktur VinFast Auto Ltd. pada bulan Mei, telah menjabat berbagai posisi di VinFast dan perusahaan anggota Vingroup.

Adiknya, Pham Nhat Minh Hoang, turut mengambil alih kepemimpinan eksekutif di penyedia armada transportasi GSM, yang juga

pemegang saham mayoritas di beberapa bisnis di sektor teknologi industri, energi, dan infrastruktur dalam ekosistem Vingroup.

Fenomena serupa juga terjadi di sektor real estat dan jasa manufaktur. Di Novaland, Bui Cao Nhat Quan menggantikan ayahnya sebagai Presiden Direktur, sementara di REE, Nguyen Ngoc Thai Binh menduduki posisi Direktur untuk mematuhi regulasi tata kelola publik. Penunjukan talenta Gen Z di konglomerat Sovico hingga Sacombank semakin menegaskan pola regenerasi ini.

“Peralihan kepemimpinan ini bukan sekadar suksesi keluarga, melainkan transformasi strategi untuk membawa korporasi Vietnam bersaing di tingkat internasional,” ungkap para pengamat industri.

Para eksekutif F2 ini membawa modal pendidikan finansial dan teknologi yang kuat. Namun, mereka juga menghadapi ujian berat: membuktikan keahlian mengemudikan konglomerat domestik di tengah perlambatan ekonomi global dan tantangan kepatuhan tata kelola (*corporate governance*) yang kian ketat.

Korean Air dan Asiana Luncurkan Wi-Fi Gratis Berbasis Starlink di Penerbangan



Sumber : Korean Air |

Dua maskapai utama Korea Selatan menjadi pelopor penggunaan internet satelit Orbit Bumi Rendah (LEO) di penerbangan Kawasan Asia Timur dan juga untuk rute jarak jauh ke Kawasan Eropa, Amerika dan Asia Tenggara.

Pasar penerbangan komersial Asia Timur memasuki era baru konektivitas setelah Korean Air dan Asiana Airlines mengumumkan penyediaan layanan Wi-Fi gratis berbasis jaringan satelit Orbit Bumi Rendah (LEO) milik Starlink., yang menandai langkah pertama maskapai penerbangan layanan penuh (FSC) utama di kawasan Asia Timur dalam mengadopsi teknologi komunikasi berkecepatan tinggi besutan SpaceX.

Layanan yang akan aktif bertahap mulai 15 September tersedia bagi seluruh penumpang di semua kelas. Tahap awal mencakup empat armada Korean Air—termasuk Airbus A350-900 dan Boeing 777-300ER—pada rute penerbangan jarak menengah dan jauh menuju Amerika, Eropa, serta Asia Tenggara. Sementara Asiana memulainya pada 10 armada A350-900 dan A330-300.

Akses internet berkecepatan tinggi ini memungkinkan penumpang menikmati streaming video OTT, gim daring, hingga pengiriman berkas berbasis komputasi awan. Fasilitas Wi-fi dapat diakses dengan menghubungkan perang-

kat elektronik, seperti telepon seluler, ke jaringan dalam pesawat, memasukkan nama dan nomor kursi yang tertera di boarding pass ke portal khusus, dan menonton iklan. Namun, panggilan berbasis internet dan siaran streaming waktu nyata dibatasi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penerbangan.

Korean Air menargetkan pemasangan instalasi Starlink pada mayoritas armada operasionalnya pada akhir tahun 2027, sedangkan Asiana menjadikannya strategi komersial utama menyongsong entitas integrasi maskapai baru.

“Kami berupaya agar pelanggan menikmati internet berkecepatan tinggi tanpa hambatan secara gratis di udara, menggunakan layanan Starlink, dan berencana menyediakan layanan yang berbeda sejalan dengan peluncuran maskapai penerbangan terintegrasi,” tegas perwakilan Asiana dalam siaran pers Jumat (11/09).

Langkah inovatif ini menggarisbawahi transformasi layanan kabin dari sekadar sarana transportasi menjadi ruang kerja dan hiburan terhubung, memperkuat daya saing maskapai Korea Selatan di kancah penerbangan global.

Menteri Energi APEC Sepakati Visi Komunitas Energi Kawasan dan Integrasi AI



Sumber : APEC Secretariat |

Tiongkok pimpin konsensus kerangka kerja 1+3+5 guna perkuat ketahanan jaringan daya regional serta transisi energi terbarukan di Asia-Pasifik dan memanfaatkan efisiensi AI untuk memprediksi permintaan, dan mendistribusikan daya secara lebih efisien.

Pertemuan Menteri Energi APEC ke-16 di Beijing resmi mengadopsi konsep pembentukan "Komunitas Energi Asia-Pasifik", menandai babak baru dalam integrasi kebijakan daya dan teknologi regional. Forum yang berlangsung selama dua hari telah menghasilkan kesepakatan kerangka kerja "1+3+5" yang dirancang untuk memperkuat keamanan pasokan serta mempercepat transisi energi hijau di seluruh kawasan.

Langkah strategis ini dipimpin Tiongkok selaku tuan rumah APEC 2026, yang mendorong kolaborasi ketat di tengah pergeseran lanskap energi global. Selain merilis Pernyataan Bersama, delegasi mengesahkan pedoman tidak mengikat untuk keamanan energi kolaboratif dan visi inklusivitas berkualitas tinggi guna memastikan keterjangkauan akses daya bagi seluruh ekonomi anggota.

Sorotan utama pertemuan ini adalah adopsi pedoman kebijakan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan sektor energi periode 2026–2030. Dokumen tersebut menetapkan peran sistem daya dalam menopang beban infrastruktur kom-

putasi global, sekaligus memanfaatkan efisiensi sistem AI untuk memprediksi permintaan, pengelolaan jaringan, dan mendistribusikan daya secara lebih efisien serta meningkatkan ketahanan dan keandalan jaringan listrik regional.

"Kawasan Asia-Pasifik menyumbang sekitar 60% dari produksi dan konsumsi energi global. Memperkuat kerja sama energi sangat relevan tidak hanya untuk pembangunan masing-masing ekonomi, tetapi juga memiliki bobot yang signifikan bagi lanskap energi global. Integrasi kecerdasan buatan dan jaringan daya akan memperkuat efisiensi sistemik sekaligus menjamin keberlanjutan infrastruktur energi Asia-Pasifik," kata Ding Xuexiang, Wakil Perdana Menteri Tiongkok dalam keterangan yang dirilis Kamis (10/09).

Guna memastikan keberlanjutan program, APEC membentuk gugus tugas khusus "Kecerdasan Buatan + Energi". Hasil kesepakatan ini akan menjadi fondasi utama dan akan dibahas lebih lanjut dalam KTT Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 di Shenzhen pada tanggal 18 sampai 19 November mendatang.

Krisis Tata Kelola Paksa Pimpinan Chubu Electric Mundur dan Tarik Izin Reaktor Nuklir Hamaoka



Sumber : Chubu Electric Power |

Skandal pemalsuan data gempa memicu pengunduran diri eksekutif puncak Chubu Electric Power namun perusahaan menegaskan tidak akan menghentikan ambisi pengoperasian kembali pembangkit listrik nuklir Hamaoka.

Chubu Electric Power Co., Inc. resmi menarik permohonan peninjauan kembali untuk mengaktifkan reaktor Unit 3 dan 4 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Hamaoka. Keputusan drastis ini diambil menyusul terungkapnya skandal pemalsuan data asumsi pergerakan tanah akibat gempa bumi, manipulasi mendasar yang meruntuhkan standar keselamatan industri energi nuklir Jepang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola, Presiden Direktur Shingo Hayashi dan Presiden Komisaris Satoshi Katsuno mengumumkan pengunduran diri efektif per 30 September ini. Selain itu, Penasehat Kehormatan, Akihisa Mizuno, yang menjabat Presiden Direktur dan Presiden Komisaris selama periode terjadinya pelanggaran turut menyatakan mundur. Kepemimpinan akan beralih ke Wakil Presiden Direktur Minoru Yasui pada awal Oktober di tengah sorotan ketat pasar global.

Pihak manajemen mengakui adanya kegagalan sistemik dan budaya organisasi yang mengabaikan kepatuhan regulasi, meskipun telah menerima peringatan dari mekanisme *whistle-*

blowing internal. Manipulasi data demi mengejar target persetujuan regulator dinilai telah menghancurkan kepercayaan publik dan kelayakan korporasi sebagai operator utilitas.

"Saya melihat ini bukan masalah yang terbatas pada beberapa departemen tetapi masalah yang memengaruhi seluruh organisasi, termasuk manajemen. Sebagai eksekutif tertinggi, merasa memiliki tanggung jawab yang besar dan sangat menyesal kami tidak mampu menciptakan budaya organisasi yang memprioritaskan tata kelola di atas segalanya." tegas Hayashi Senin (14/09).

Meski permohonan ditarik, Chubu Electric menegaskan tidak akan menghentikan ambisi pengoperasian kembali Hamaoka di masa depan. Guna memulihkan reputasi, perusahaan membentuk unit pengawas tata kelola baru di bawah komando direktur eksternal.

Pemerintah Jepang menyatakan tidak mengubah kebijakan pemanfaatan energi nuklir untuk dekarbonisasi, namun menegaskan bahwa Otoritas Regulasi Nuklir akan menindak keras setiap pelanggaran keselamatan korporasi.

Menteri Keuangan Suahasil Tegaskan Komitmen Disiplin Fiskal dan Efisiensi APBN



Pelantikan menteri keuangan baru menandai kesinambungan pengelolaan APBN dengan target defisit di bawah 3% dan menjadikannya sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



**Presiden Prabowo
Desak Konsolidasi
BRICS guna
Reformasi Tata Kelola
Keuangan Global**



**Kabupaten Bekasi
Bidik Investasi Rp70
Triliun Berbekal
Status Hub
Manufaktur**



**Gelombang Suksesi
Gen-F2 Mengubah
Peta Kepemimpinan
Korporasi Vietnam**



**Korean Air dan Asiana
Luncurkan Wi-Fi
Gratis
Berkas Starlink
di Penerbangan**